



RENCANA KERJA (RENJA)

2025

BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA GORONTALO
TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan SKPD khususnya dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun kedepan, dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal disusun.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo ini, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kota Gorontalo mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, dengan mengedepankan skala prioritas, sehingga setiap program dan kegiatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) yang telah disusun ini diharapkan diikuti dengan tindaklanjut berupa pelaksanaan, komitmen dan motivasi yang tinggi melaksanakan rencana yang telah tersusun ini. Harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran – sasaran pembangunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Gorontalo, Juli 2024

KEPALA

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO**



Dr. H. BEN IDRUS, M.Pd

NIP. 19641215 199003 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Semester 1 Tahun 2024	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	41
3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V. PENUTUP	5

DAFTAR TABEL

- TC. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo	6
- Tabel 2.2 Analisis Capaian Kinerja Untuk Sasaran Strategi.....	13
- Tabel 2.3 Pengukuran Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023.....	13
- Tabel 2.4 Data PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas Tahun 2023	14
- Tabel 2.5 Data ASN yang mengikuti Tugas Belajar Tahun 2023	15
- Tabel 2.6 Data Kegiatan Pengembangan Kompetensi BKPP Kota Gorontalo 2023	21
- Tabel 2.7 Data ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2023	22
- Tabel 2.8 Data Hukuman Disiplin Tahun 2023.....	24
- Tabel 2.9 Pemberian Penghargaan Satya Lencana dari Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2023.....	25
- Tabel 3.15 Analisi Capaian Kinerja Untuk Sasaran Strategis	26
- Tabel 3.16 Data Capaian Unsur Pelayanan	26
- Tabel 3.17 Data Survey IKM 2020-2022	28
- Tabel 3.18 Data Layanan Pengurusan Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tahun 2022	29
- Tabel 3.19 Aplikasi Layanan Kepegawaian dan Kegunaannya	29
- TC. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo	31
- TC. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Gorontalo Tahun 2023.....	36
- TC. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakira Maju Tahun 2025 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo	43
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan BKPP Kota Gorontalo Tahun 2025	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Gorontalo dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun Pertama Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun

2025-2026 yang sejalan dengan upaya pencapaian target sasaran sebagaimana tercantum pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Tahun 2024 dari Rencana Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2025-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);
- i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 – 2024;
- j. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan pada APBD Tahun 2025. Secara rinci maksud dari penyusunan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan untuk Anggaran Tahun 2025 guna membangun kinerja yang lebih akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2025 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Semester 1 Tahun Anggaran 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAEAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo selama Tahun 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2024 telah terlewati. Berbagai Program dan Kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu dan pencapaian renstra OPD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

TC. 29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Resntra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Thn 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja PD (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn Berjln(2024 TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)%)
2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Urusan									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,2%	83,2%
PERENCANAAN,PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	21 Dokumen	87,5%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	2 Dokumen	10 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	-	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	11 Dokumen	91,6%
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,65%	91,65%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/Bulan	123 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	100%	42 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	100%
Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	30 Dokumen	83,3%
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,3%	83,3%

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	30 Laporan	83,3%
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-	100%	75%	75%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	36 Dokumen	-	-	-	12 Dokumen	18 Dokumen	75%
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Umum	100%	104%	100%	100%	100,55%	100%	85,6%	85,6%
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	36 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	30 Paket	83,3%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	36 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	30 Paket	83,3%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	36 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	30 Paket	83,3%
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	60 Paket	36 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	30 Paket	83,3%
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	30 Laporan	83,3%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	95 Laporan	30 Laporan	31 Laporan	103,3%	4 Laporan	67 Laporan	97,1%
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Pegadaan Barang Milik Daerah	100%	30 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	100%	32 Unit	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	29 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	9 Unit	32 Unit	100%
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	97,2%	100%	83%	83%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	30 Laporan	83,3%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	11 Laporan	91,6%	12 Laporan	30Laporan	83,3%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	30 Laporan	83,3%

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	59,9%	59,9%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	14 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	3 Unit	17 Unit	94%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5 Unit	3 Unit	1 Unit	-	-	0 Unit		0%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	60 Unit	24 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	30 Unit	85,71%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	122%				98%		
PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Persentase ASN yang diangkat Berdasarkan formasi yang ditetapkan	100%	220%	100%	220%	100%	95%	105,23%	105,23%
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaam PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	10 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	520 Dokumen	328 Dokumen	100 Dokumen	201 Dokumen	100%	100 Dokumen	502 Dokumen	161,9%
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	5 Lembaga	8 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100%	1 Lembaga	9 Lembaga	150%
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 Dokumen	8 Dokumen	57,14%
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	8 Dokumen	57,14%
MUTASI DAN PROMOSI ASN	Persentase Mutasi dan Promosi yang Diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	112%	100%	100%	100%	100%	87,06%	87,06%

Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	5 Dokumen	83,3%
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	8820 Dokumen	3063 Dokumen	1750 Dokumen	1962 Dokumen	112.1%	1500 Dokumen	4061 Dokumen	81.8%
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	2 Dokumen	25 Dokumen	96,1%
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	Jumlah ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi	100%	101%	100%	101%	100.9%	100%	29.4%	29.4%
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	600 Orang	316 Orang	315 Orang	316 Orang	100.3%	300 Orang		115%
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	36 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	26 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	120%	5 Laporan	12 Laporan	70,5%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi	77.96%	66%	66.3%	60%	90%	77,96%	188%	188%
SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Struktural	100%	38 Orang	38%	38%	100%	100%	188%	188%
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	469 Laporan	242 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	100%	3 Laporan	79 Laporan	188%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Namun pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo belum mempunyai dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.

Badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan Kota Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Kota Gorontalo, dan melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pelaksanaan tugasn dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo tersebut diatas, maka indikator kinerja berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Indeks Profesionalitas ASN
- 2) Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian berbasis IT
- 3) Nilai AKIP

4) Persentase Hasil Temuan yang ditindaklanjuti

Pengukuran capaian kinerja Sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama dan penjelasan dari capaian masing-masing IKU adalah sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kualitas ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai penilaian dan evaluasi tindak lanjut dalam upaya pengembangan profesionalisme Pegawai ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan rumus sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Pengukuran IP ASN meliputi 4 Dimensi dengan Bobot masing – masing dimensi adalah sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi memiliki bobot 25%
2. Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi memiliki bobot 40%
3. Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja memiliki bobot 30%
4. Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin memiliki bobot 5%

Hasil evaluasi capaian/realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 yang dilakukan terhadap 3881 pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.2
Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran strategis

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Kualitas Sumber daya Aparatur				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	65	62.9	96.7

Dengan nilai masing – masing dimensi sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pengukuran Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023

No	Dimensi	Bobot Per Dimensi	Capaian Tahun 2023	Capaian (%)
1	Kualifikasi	25	20.89	83.56
2	Kompetensi	40	12.01	30.02
3	Kinerja	30	25.05	83.5
4	Disiplin	5	5	100
Nilai Akhir		100	62.95	

Berdasarkan tabel 2.2 dan tabel 2.3 diatas indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN belum mencapai target, dimana untuk tahun 2023 ditargetkan dengan nilai 65 akan tetapi realisasi nilai yang di capai 62.9 atau 96.7%, hal ini disebabkan seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo belum melakukan pembaruan data terkait kompetensi yang mereka dapat dari berbagai pelatihan pengembangan diri pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dari Jumlah ASN Tahun 2023 hanya 3881 ASN yang berpartisipasi sehingga berdampak pada rendahnya Nilai IP ASN.

Dalam pencapaian indikator ini BKPP Kota Gorontalo melaksanakan kegiatan selama Tahun 2023 yang direncanakan pada Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo antara lain :

1. Menyelenggarakan kegiatan Ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Untuk pencapaian nilai dimensi Kualifikasi, Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan telah melaksanakan ujian dinas dan penyesuaian ijasah kepada 112 Orang dan yang lulus dan memperoleh surat tanda kelulusan berjumlah 57 Orang seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Data PNS yang mengikuti Ujian Dinas Tahun 2023

No	Jenis Ujian Dinas	Jumlah Peserta (Orang)		
		Mendaftar	Lulus	Tidak Lulus
1	Ujian Dinas Tingkat I	149	94	53
2	Ujian Dinas Tingkat II	7	5	2
3	Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah (SMP-SMA)	4	2	2
4	Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah (S1- S2)	15	13	2
JUMLAH		175		
Peserta yang Lulus			114	59
Presentase			65,1	33,71

2. Pemberian Tugas Belajar

Dalam mendukung upaya transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dengan melakukan pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Peningkatan Pendidikan melalui pemberian tugas belajar dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan dari OPD mengenai tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

Untuk peningkatan kualifikasi pendidikan PNS, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang memuat persyaratan tugas belajar, penyelenggaraan tugas belajar dan persyaratan program studi, pendanaan tugas belajar, jangka waktu tugas belajar, perpanjangan tugas belajar, tugas belajar berkelanjutan, kedudukan, hak dan kewajiban PNS yang melaksanakan tugas belajar, pembatalan dan penghentian tugas belajar, pemantauan dan evaluasi serta ketentuan lain yang terkait pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.

Pada tahun 2023 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo memberikan fasilitas kepada 58 orang PNS untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi melalui pendidikan lanjutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Data ASN yang mengikuti Tugas Belajar Tahun 2023

NO	NAMA	NIP	TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN/PROGRAM STUDI	INSTANSI
1	HELENA SUNGE	197610202014072001	S1	PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS TERBUKA KOTA GORONTALO	SEKRETARIAT DPRD
2	H. HARSON AHUDULU, SKM	197510182003121006	S2	PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PASCA SARJANA UNIVERSITAS GORONTALO	DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO
3	NAZLI ALAMRI, SST.Ft	197301051999032012	PROFESI	PROGRAM STUDI FISIOTERAPI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN MAKASAR	RSUD PROF.DR.HI ALOEI SABOE KOTA GORONTALO
4	IRWANTO ISMAIL, S.ST,FT	198702132011011001	PROFESI	PROGRAM STUDI FISIOTERAPI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN MAKASAR	RSUD PROF.DR.HI ALOEI SABOE KOTA GORONTALO
5	OLAN JUSUF, S.ST	197307121992032003	S2	ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BINA TARUNA GORONTALO	DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO
6	YERRY BIAHIMO, A.Md.KL	198305172005012011	S1	PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS GORONTALO	PUSKESMAS KOTA SELATAN
7	ZULKIFLI, AMKL	198409172009011001	S1	PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS GORONTALO	PUSKESMAS DUMBO RAYA
8	SALAMI YUNUS, A.Md.Kes	197507172006042009	S1	PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS GORONTALO	DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO
9	MOH. ISKANDAR CAMARU, AMKL	197307262003121006	S1	KESEHATAN MASYARAKAT PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS GORONTALO	PUSKESMAS KOTA UTARA
10	ZENAB DANIAL, AMKL	198004122009012001	S1	KESEHATAN MASYARAKAT PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS GORONTALO	PUSKESMAS KOTA SELATAN

11	NINGSIH AMUJA, S.Pd	198404042011012010	S2	MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PADA UNIVERSITAS BINA TARUNA	DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO
12	VIBRIANTI DANCE TUI, AM.KL	197408162006042023	S1	KESEHATAN MASYARAKAT PADA PROGRAM STUDI ILMU MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS GORONTALO	PUSKESMAS KOTA BARAT
13	IWAN ADAM	197808072007011019	S1	ADMINISTRASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS GORONTALO	UPTD LLK UKM
14	WILAN MARJUN, A.Md,Keb	199107102017042001	S1	PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO	PUSKESMAS HULONTHALANGI
15	ASMA HANAPI, S.ST	197508242006042022	S2	PROGRAM STUDI MANAJEMEN KESEHATAN PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	PUSKESMAS PILOLODAA
16	RIDWAN DILAPANGA, S.H	198401122015021001	S2	PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	INSPEKTORAT KOTA GORONTALO
17	SAFNI, A.Md.Kep	198607042011012001	PROFESI	PROFESI NERS FAKULTAS ILMU KESEHATAN PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO	PUSKESMAS HULONTHALANGI
18	KARTO NURKAMIDEN, S.Pd	198709192010011001	S2	MAGISTER PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	SDN NO. 69 KOTA TENGAH
19	NOVITA DAI, A.Md	197411301999032006	S1	JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI PADA UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	DINAS PERHUBUNGAN
20	FEDYAH BADJEBER, A.Ma.Ak	196909291996032004	S1	PROGRAM STUDI EKONOMI JURUSAN EKONOMI AKUNTANSI PADA UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO
21	ERWIN ASNAWI, S.Pd	197902172006041010	S2	MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	SMP NEGERI 9 GORONTALO
22	MOHAMAD ZULFAZLI DJIBRAN	198508212010011002	S1	PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PADA UNIVERSITAS GORONTALO	SEKERTARIAT DPRD
23	EFENDI HUNAWA, SE	197601292006041010	S2	PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS BINA TARUNA GORONTALO	BADAN KEUANGAN

24	LIAN YASIN KUENGO	198003012007012021	S1	PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS GORONTALO	PUSKESMAS PILOLODAA
25	FATMAWATY MOHAMAD, S.Pd	198707142010012001	S2	PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	SDN NO. 79 KOTA TENGAH
26	NURHADI TAHA, S.Pd	198509042011011003	S2	PROGRAM PENDIDIKAN STRATA II ADMINISTRASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS MUHAMADIYAH GORONTALO	BADAN KESATUAN BANGSA
27	RACHMIYATI TAKI, SE	197807292010012001	S2	PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA UNIVERSITAS GORONTALO	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28	CITRA TANGOI, S.Sos.	198209142007012004	S2	PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA UNIVERSITAS GORONTALO	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
29	ROSMIN LIPUTO, SE	197601212005012012	S2	PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PADA UNIVERSITAS GORONTALO	KELURAHAN BULADU
30	MOHAMAD NOVRIAN ABAS, S.STP	199811022020081000	S2	PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS BINA TARUNA GORONTALO	PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS BINA TARUNA GORONTALO
31	KHARISMA TANGGUDA, S.STP	199804082020082001	S2	PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS BINA TARUNA GORONTALO	PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS BINA TARUNA GORONTALO
32	HERLINA MOHA, A.Md	198204052006042034	S1	FAKULTAS EKONOMI PADA UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
33	ROLIN KAMALI, S.STP	199112102012061001	S2	PENDIDIKAN STRATA II PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIKPADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	KELURAHAN DULALOWO TIMUR
34	MULYONO MARDJUN, ST	198507052011011001	S2	PENDIDIKAN STRATA II PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIKPADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

35	MACHFUD CAESAR RAMDHANI BULUATI, S.Pd	199104082020121009	S2	PENDIDIKAN PASCA SARJANA PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN MATEMATIKA	SMP NEGERI 11 GORONTALP
36	AMMAIYA USMAN, SE	197903042010012001	S2	PENDIDIKAN STRATA II PROGRAM STUDI AKUNTANSI PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
37	SELVI LIANA TAHIR, SE	198411162010012002	S2	PENDIDIKAN STRATA II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	DINAS PARMISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
38	ISWAHYUDI MAUKE, S.IP	199601122017081001	S2	PENDIDIKAN STRATA II PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAERAH PENGEMBANGAN DAERAH
39	IYUT NIODE, S.Pd	198406122009012003	S2	PENDIDIKAN STRATA II PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
40	DWI VERANINGSEH, S.Kep	199602112020122004	PROFESI	PENDIDIKAN PROFESI NERS PADA FAKULTAS OLAHRAGA DAN KESEHATAN	PUSKESMAS SIPATANA
41	RIDWAN A JULA,SH	198908182020121005	S2	PENDIDIKAN STRATA II (S2) PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	SEKERTARIS DAERAH PADA BAGIAN HUKUM
42	MONALISA KURNIA KORAAG ST.Keb	198603132009012003	S2	PENDIDIKAN STRATA II (S2) PROGRAM STUDI ILMU KEBIDANAN PADA UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASAR	PUSKESMAS KOTA TIMUR
43	DEIBY NATALIA MAMONTOH.S.Pd	197312242006042000	S2	PENDIDIKAN STRATA II (S2) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILADAN KEWARGANEGARAAN PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	DINAS PENDIDIKAN
44	SUNARTI, S.Pd	197006221998022000	S2	PENDIDIKAN STRATA II (S2) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILADAN KEWARGANEGARAAN PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	DINAS PENDIDIKAN
45	DEFRI LILYANDRI LAPAGAU, SE	198708302010012001	S2	PENDIDIKAN STRATA II (S2) PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

46	ZEFRIN, M.Pd	198804032010011001	S3	PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR PADA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	SDN NO. 63 KOTA TIMUR
47	drg. HENDRA WAHYUDI RUMAGIT, SKG	198711202015021003		PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM STUDI ILMU KONSERVASI GIGI PADA UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASAR	PUSKESMAS KOTA TENGAH
48	dr. JEMMY MATOHA, Sp.B	197405192008031002		PROGRAM PENDIDIKAN KONSULTAN BEDAH VASKULAR DAN ENDOVASKULAR PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA	RSUD PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO
49	dr. NINA APRIYANI MATOKA	198804082015022001		PROGRAM STUDI PSIKIATRI JENJANG PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS	PUSKESMAS KOTA SELATAN
50	LINDA H OLII	197503022009012002	DIII	PENDIDIKAN DIII TEKNOLOGI BANK DARAH PROGRAM RECOGNISI PEMBELANJARAN LAMPAU PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG	DINAS KESEHATAN
51	TYAS WIDYASTUTI	198602242009012001	DIII	PENDIDIKAN DIII TEKNOLOGI BANK DARAH PROGRAM RECOGNISI PEMBELANJARAN LAMPAU PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG	DINAS KESEHATAN
52	YUYUN IMRAN	198105062006042016	DIII	PENDIDIKAN DIII TEKNOLOGI BANK DARAH PROGRAM RECOGNISI PEMBELANJARAN LAMPAU PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG	DINAS KESEHATAN
53	dr.MOHAMAD RIZKY BAHMID	199110192020121003		PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM STUDI SPESIALIS BEDAH TORAKS, KARDIAK DAN VASKULAR UNIVERSITAS INDONESIA	RSUD PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO
54	dr.ERDIANSJAH T. TUWENO S.Ked	19111112020121007		PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA	RSUD OTANAHA
55	dr.MONICA LIE SEDJATI	199201252020122004		PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI UNIVERSITAS SAMRATULANGI MANADO	RSUD OTANAHA

56	dr.ABDUL JABAR MUHAMMAD	199210222020121004		PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ILMU KESEHATAN THT-KL PADA UNIVERSITAS HASANUDIN	RSUD OTANAHA
57	ELSMIN TRI YULYANA KIAY.S.Kep.NS	198107222006042000	S2	PENDIDIKAN PROGRAMSTUDI MAGISTER KEPERAWATAN DAN SPESIALIS KEPERAWATAN DAN MEDIKAL BEDAH PADA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN	RSUD PROF.DR.HI ALOEI SABOE KOTA GORONTALO
58	MONALISA KURNIA KORAAG ST.Keb	198603132009012003	S2	PENDIDIKAN STRATA II (S2) PROGRAM STUDI ILMU KEBIDANAN PADA UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASAR	PUSKESMAS KOTA TIMUR

3. Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan atau keahlian yang bukan lebih dari sekedar ketrampilan (skill), Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/pengetahuan, tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian yang dikuasai dalam bidang tertentu. Kompetensi dibentuk oleh interaksi antara faktor pengalaman dan faktor genetik. Kompetensi digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokkan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam melakukan pekerjaan.

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil Negara dapat diperoleh melalui pengalaman pekerjaan, diklat dan tugas belajar. Seperti tersebut dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 pada pasal 4 ayat (1) setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja kompetensi PNS yang bersangkutan ayat (2) Hak dan Kesempatan untuk mengikuti pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun.

Untuk itu dalam mencapai indikator sasaran Indeks profesionalitas ASN pada dimensi Kompetensi dapat dilihat pada tabel 3.3 pada Tahun 2022 memperoleh peningkatan sejumlah 13.58% dibandingkan dengan tahun 2021 dengan capaian 11.01% ini dikarenakan adanya langkah – langkah yang diupayakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo selain karena adanya Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pelatihan Pengembangan Kompetensi juga dengan dibuatkan aplikasi yakni Sistem Elektornik Informasi Kompetensi (SIERIK) yang sejak awal tahun 2023 dilaunching, aplikasi ini memberikan memudahkan

yang signifikan untuk memperoleh data terkait analisis kebutuhan diklat, kesenjangan pelatihan level individu dan pelatihan yang dapat diikuti oleh setiap Aparatur Sipil Negara.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan bagi ASN, baik fasilitasi, pengiriman maupun penyelenggaraan melalui Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Diklat Penjenjangan ASN melalui program pengembangan sumber daya manusia antara lain :

- a. Pelatihan / Bimbingan teknis kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian
- b. Pelatihan Dasar (Latsar)
- c. Orientasi PPPK
- d. Sosialisasi/ Diseminasi/Bimtek/Workshop bagi ASN

Berikut dapat dilihat kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo yang tertuang dalam Rencana Kerja BKPP Tahun 2023 dan juga ASN dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang memperoleh pengembangan kompetensi yang dilaporkan melalui aplikasi SIERIK pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Data Kegiatan Pengembangan Kompetensi BKPP Kota Gorontalo
Tahun 2023

No	Jenis Kegiatan	Jumlah ASN yang mengikuti	Metode yang digunakan
1	Pelatihan Dasar (Latsar)	3 CASN	Pola Kontribusi
2	Orientasi PPPK	65 ASN	
3	Diklat Pejabat Fungsional	1 ASN	

Pelaksanaan Pelatihan Dasar (LATSAR) di berikan kepada 3 (tiga) orang Lulusan Sekolah Kedinasan Perhubungan (STTD) yang penyelenggaraanya di Badan Diklat Provinsi Gorontalo dengan menggunakan pola kontribusi atau pengiriman peserta, akan tetapi dalam pelaksanaannya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo melalui Bidang PPD melakukan pendampingan dan monitoring secara berkala.

Untuk pelaksanaan kegiatan orientasi PPPK diberikan kepada 65 Orang PPPK yang terdiri dari Guru dan Tenaga Kesehatan, yang pelaksanaannya secara mandiri oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.

Tabel 2.7

**DATA ASN YANG MEMPEROLEH PENGEMBANGAN KOMPETENSI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023**

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SATUAN	JUMLAH ASN	JUMLAH PEGAWAI YANG MEMPEROLAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI
1	BKPP KOTA GORONTALO	ASN	42	26
2	SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO	ASN	115	66
3	BADAN KESBANGPOL KOTA GORONTALO	ASN	22	15
4	BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO	ASN	73	70
5	BLUD PROF.DR. H. ALOEI SABOE	ASN	453	27
6	BPBD KOTA GORONTALO	ASN	20	10
7	BAPPELITBANG KOTA GORONTALO	ASN	44	25
8	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA GORONTALO	ASN	19	12
9	DKPP KOTA GORONTALO	ASN	77	45
10	DINAS DUKCAPIL KOTA GORONTALO	ASN	29	7
11	INSPEKTORAT KOTA GORONTALO	ASN	56	21
12	DINAS KOMINFO KOTA GORONTALO	ASN	27	26
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GORONTALO	ASN	44	15
14	DINAS PANGAN KOTA GORONTALO	ASN	24	8
15	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA GORONTALO	ASN	33	13
16	DPMPSTP KOTA GORONTALO	ASN	31	10
17	DPPKBP3A KOTA GORONTALO	ASN	30	19
18	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA GORONTALO	ASN	32	14
19	DINAS PERHUBUNGAN KOTA GORONTALO	ASN	35	11
20	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GORONTALO	ASN	23	16
22	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA GORONTALO	ASN	34	10
23	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KOTA GORONTALO	ASN	37	16

24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO	ASN	69	17
25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GORONTALO	ASN	72	7
26	SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO	ASN	28	21
27	DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO	ASN	1410	1018
28	DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO	ASN	613	298
29	KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO	ASN	40	21
30	KECAMATAN KOTA SELATAN KOTA GORONTALO	ASN	43	19
31	KECAMATAN DUMBORAYA KOTA GORONTALO	ASN	40	17
32	KECAMATAN DUNGINGI KOTA GORONTALO	ASN	47	21
33	KECAMATAN KOTA BARAT KOTA GORONTALO	ASN	57	23
34	KECAMATAN KOTA UTARA	ASN	45	21
35	KECAMATAN SIPATANA	ASN	37	16
36	KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO	ASN	44	21
37	KECAMATAN HULONTHALANGI KOTA GORONTALO	ASN	36	16
38	BKPP KOTA GORONTALO	ASN	42	26
39	SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO	ASN	115	66
TOTAL			3881 ASN	2016 ASN

4. Penegakan serta Peningkatan disiplin dan kinerja PNS Kota Gorontalo.

- Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP) merupakan penghasilan yang diberikan kepada ASN secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar gaji, tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tunjangan Jabatan Administrasi dan tunjangan jabatan fungsional. Dasar penetapan besaran TPP berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 41 Tahun 2021. Parameter pemberian TPP yakni Parameter berdasarkan Prestasi kerja.

Pemberian TPP ini bertujuan untuk memberikan dorongan kepada ASN untuk meningkatkan kinerja, disiplin serta kesejahteraan hidup pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.

- Penegakan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Penegakan disiplin bagi aparatur sipil negara di instansi Pemerintah Kota Gorontalo dilakukan secara terus menerus. Pada Tahun 2023 jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan berjumlah 9 kasus yang terdiri dari 3 jenis hukuman disiplin seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Data Hukuman Disiplin Tahun 2023

NO	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TAHUN
		2022
A	RINGAN	
1	Teguran Lisan	1 Orang
2	Teguran Tertulis	1 Orang
3	Pernyataan Tidak Puas secara tertulis	1 Orang
Jumlah Hukuman Disiplin Ringan		3 Orang
B	SEDANG	
1	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	-
2	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	-
3	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	-
Jumlah Hukuman Sedang		0 Orang
C	BERAT	
1	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	-
2	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	-
3	Pembebasan dari jabatan	1 Orang
4	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	4 Orang
5	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	1 Orang

Jumlah Hukuman Berat	6 Orang
Total Per Tahun	9 Orang
Jumlah Pegawai	3881 Orang
persentase ASN yang memperoleh hukuman disiplin	0,2%

- Pemberian tanda kehormatan satyalancana karya satya

Bentuk pemberian perhatian Pemerintah Kota Gorontalo terhadap ASN yang memiliki loyalitas, kinerja dan prestasi yang baik diwujudkan dengan pemberian berbagai penghargaan, salah satunya adalah dengan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya. Penganugerahan Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan dari Negara terhadap PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta penuh dengan pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai yang lainnya. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya PNS dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Satyalancana Karya Satya berwarna perunggu, diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
2. Satyalancana Karya Satya berwarna perak, diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
3. Satyalancana Karya Satya berwarna perunggu, diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Berikut data Pemberian Penghargaan Satya Lencana dari Tahun 2020 sampai dengan 2023

Tabel 2.9

Pemberian Penghargaan Satya Lencana dari Tahun 2020 sampai dengan 2023

No	Masa Kerja	Jumlah				Total
		s/d 2020	2021	2022	2023	
I	30	369	53	13	70	505
	Tahun					
II	20	543	71	32	32	678
	Tahun					
III	10	741	265	70	11	1087
	Tahun					
Jumlah		1653	389	115	113	2.270

Terhadap hasil evaluasi capaian/realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, Terdapat hambatan dan pendorong dalam pencapaian Indeks Profesionalitas ASN, Faktor Penghambat pencapaian IP ASN antara lain :

- Belum ditetapkan Rencana Pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN yang didukung oleh anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
- Belum adanya Beasiswa bagi PNS untuk Peningkatan Kualifikasi Melalui Jalur Pendidikan Formal
- Masih adanya ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan secara mandiri belum sesuai ketentuan dalam hal pengurusan tugas belajar
- Belum maksimalnya implementasi penerapan Perwako terkait Pengembangan Kompetensi Pola Satu Pintu
- Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan dari Atasan terhadap Disiplin Pegawai Dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah

Untuk itu, beberapa langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Menyusun Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
- Melaksanakan sosialisasi terkait pentingnya pengurusan tugas belajar sebelum melaksanakan pendidikan lanjutan
- Memaksimalkan implementasi Perwako dalam pengembangan kompetensi aparatur pada setiap organisasi perangkat daerah
- Evaluasi dan Monitoring Pembinaan dan Pengawasan Disiplin Di setiap Organisasi Perangkat Daerah
- Mendorong Kesadaran PNS dalam Meningkatkan Kualitas dan Kualifikasi Melalui Pendidikan Lanjutan

2. **Indeks Kepuasan terhadap layanan administrasi kepegawaian berbasis IT**

Sesuai amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan survey kepuasan masyarakat. Survey kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran yang dilakukan secara komprehensif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sebagaimana diatur dalam Permenpan RB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Instansi Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik baik yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara periodik dilingkungan masing – masing minimal 1 (satu) tahun sekali.

Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan bentuk upaya perbaikan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo melaksanakan survey kepuasan masyarakat khusus pelayanan administrasi kepegawaian Tahun 2023.

Capaian realisasi Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian berbasis IT Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran strategis

Sasaran Strategis 2				
Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan yang berkualitas Prima				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian berbasis IT	Persen	85	91.31	107.42

Tahun 2023 Indikator kinerja ini memperoleh nilai 91,31 dari target nilai 85, atau memperoleh kategori **sangat baik**. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan di Kota Gorontalo dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil survey indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian tahun 2023 yang diperoleh dari pengolahan kuesioner yang dibagikan kepada 200 responden, secara keseluruhan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dikategorikan **baik**, dengan nilai rata-rata unsur pelayanan yang memperoleh nilai tertinggi (3,96) adalah unsur **biaya/tarif** dikarenakan menurut responden yang telah disurvei semua pelayanan administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo tidak dipungut biaya atau gratis, sedangkan unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah (3,47) adalah unsur **Waktu Penyelesaian**, hal ini penyebabnya adalah kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.

Berikut ini adalah data capaian unsur pelayanan serta analisis capaian :

Tabel 2.11
DATA CAPAIAN UNSUR PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN		
		2021	2022	2023
1	Persyaratan	3,54	3,50	3,60
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,58	3,53	3,58
3	Waktu penyelesaian	3,53	3,49	3,47
4	Biaya/Tarif	3,91	3,95	4,00
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,46	3,60	3,58
6	Kompetensi Pelaksana	3,57	3,59	3,48
7	Perilaku Pelaksana	3,55	3,64	3,60
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,76	3,91	3,96
9	Sarana dan Prasarana	3,61	3,61	3,62
	Jumlah Nilai	3,60639	3,60639	3,65222
	Nilai IKM	90,16	91,11	91,31
	CAPAIAN KINERJA	106	107,18%	107,42%

Sebagaimana terlihat pada data diatas, tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan BKPP Kota Gorontalo sebesar 91.31% berada pada interval mutu “A” dengan kategori kinerja unit pelayanan “sangat baik”. Selanjutnya dalam rangka pencapaian indikator kinerja indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian, BKPP melaksanakan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 5 Sub Kegiatan dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 1.284.166.148,- atau setara 94.41% dari total pagu

anggaran sebesar Rp. 1.378.991.025,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2023		
		PAGU		PERSENTASE KEUANGAN
		TARGET	REALISASI	
1	Program Kepegawaian Daerah	1.378.991.025	1.284.166.148	93.12
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	938.709.725	852.911.838	90.85
1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	167.405.000	157.767.150	94.24
1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12.102.800	12.005.000	99.19
1.3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	8.314.000	4.747.300	54.10
1.4	Pengelolaan sistem Informasi Kepegawaian	61.930.000	61.882.880	99.92
1.5	Pengelolaan Data Kepegawaian	21.676.800	21.384.000	98.64
2	Mutasi dan Promosi	440.281.300	431.254.310	97.94
2.1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	81.291.400	81.037.350	99.23
2.2	Pengelolaan Promosi ASN	49.194.100	47.828.010	97.22

Adapun perbandingan kinerja berdasarkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.12
Data Survey IKM 2020 - 2023

Tahun	Jumlah Responden	Unsur Tertinggi	Unsur Terendah	Nilai	Mutu	Kinerja
2020	200	Unsur Biaya/Tarif(U4)	Unsur Persyaratan (U1)	81.35	B	Baik
2021	200	Unsur Biaya/Tarif(U4)	Unsur Biaya/Tarif (U4)	90,16	A	Sangat Baik
2022	200	Unsur Biaya/Tarif(U4)	Unsur Biaya/Tarif (U4)	91.11	A	Sangat Baik
2023	200	Unsur Biaya/Tarif(U4)	Waktu Pelayanan (U3)	91,31	A	Sangat Baik

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat melampaui target dari target kinerja 85% dengan realisasi 91.31% atau capaian sebesar 107,42%. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0.20 point. Hal ini disebabkan karena adanya upaya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo melalui Bidang Mutasi, Pensiun, Status dan Informasi Administrasi ASN dalam meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian antara lain :

1. Layanan Pengurusan Kenaikan Pangkat
2. Layanan Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala
3. Layanan Pengurusan Pensiun untuk PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun
4. Layanan Pengurusan Administrasi Kepegawaian Lainnya

Pada Tahun 2023 BKPP Kota Gorontalo telah memberikan layanan pengurusan administrasi kepegawaian dan diselesaikan tepat waktu seperti dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13

Data Layanan Pengurusan administrasi kepegawaian yang diselesaikan Tahun 2023

Jenis Layanan	Usulan	Realisasi	Diselesaikan tepat waktu
Kenaikan Gaji Berkala	1590	1590	1590
Kenaikan Pangkat	836	644	544
Pensiun Pegawai	196	195	195
Karis/Karsu	79	66	66

Meskipun telah melebihi target BKPP tetap melakukan upaya untuk perbaikan pelayanan kepegawaian secara keseluruhan antara lain :

1. Peningkatan produktivitas seluruh pegawai supaya dapat mengoptimalkan waktu pengerjaan di semua bidang layanan
2. Secara terus menerus mengembangkan system kepegawaian, sampai dengan tahun 2023 BKPP Kota Gorontalo telah mengembangkan SIMPEG Online sehingga memudahkan pengurusan administrasi kepegawaian oleh seluruh pegawai. Aplikasi tersebut dapat dilihat lebih rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.14

Aplikasi Layanan Kepegawaian dan Kegunaannya

No	Nama Aplikasi	Fungsi Aplikasi
1	E-Kenpa	Aplikasi ini digunakan untuk pengusulan kenaikan pangkat bagi PNS secara elektronik
2	E-KGB	Aplikasi ini digunakan untuk memberikan pelayanan Usul Kenaikan Gaji Berkala PNS secara elektronik
3	SIPEKAKA	Aplikasi ini memberikan Pelayanan Usul Pensiun/Karis/su dan Karpeg secara elektronik
4	Digital Repository	Aplikasi ini menyediakan Tempat dokumen Kepegawaian secara online yang bias diakses kapanpun dan dimanapun serta pencetakan profil ASN
5	Si-Erik (Sistem Elektronik Informasi Kompetensi)	Aplikasi yang memperoleh data perencanaan pengembangan kompetensi ASN
6	Sistem Informasi Mutasi Pegawai Terintegrasi (Simpati)	Aplikasi yang ditujukan untuk penyelenggaraan mutasi pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
7	Elektronik Carir Development (E-CD)	Penyelenggaraan Manajemen Karir Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
8	Simpeg	Aplikasi yang ditujukan untuk melakukan pengelolaan data kepegawaian
9	Si-Ben (Sistem Ujian Berbasis Elektronik)	Aplikasi yang digunakan untuk Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian ljasah menggunakan sistem CAT
10	E-kinerja (Kinerja Online)	Aplikasi yang ditujukan untuk menyusun SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) serta mengukur kinerja individu secara bulanan dan tahunan
11	Sijabti (Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)	Aplikasi yang ditujukan untuk informasi pendaftaran Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka

3. Nilai Evaluasi LKIP

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo sebagai instansi Pemerintah yang berorientasikan pada Akuntabilitas Kinerja yang hasilnya dapat diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Permenpan-RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP, evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Pencapaian.

Berdasarkan hasil evaluasi LKIP Perangkat Daerah yang tertuang dalam surat Inspektorat Kota Gorontalo Nomor: 04.e/LHE/P.KIN/INSP/2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2022. Pencapaian nilai evaluasi LKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo melebihi target yang ditetapkan (nilai 85) dengan mendapatkan **Predikat Memuaskan**, dengan Nilai 85.20. dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.14

Bobot / Skala Penilaian Kinerja

No	Komponen	Bobot	Total Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	27.60
2	Pengukuran Kinerja	30	21.60
3	Pelaporan Kinerja	15	13.80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22.25
	Jumlah	100	85.20

Untuk penilaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024. Evaluasi kinerja dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen kinerja yang meliputi : Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Dari penilaian LKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2023 terdapat rekomendasi yang harus dilakukan perubahan/perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut :

1. Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKPP

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi), Untuk itu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo akan memperbaiki dalam penyusunan Renstra, Renja

dan LKIP sesuai dengan ketentuan, selain terhadap pencapaian indikator yang tertuang pada perjanjian kinerja baik itu indikator program maupun kegiatan yang belum mencapai target dan akan melakukan upaya perbaikan dalam penyusunan program dan kegiatan dengan memprioritaskan program dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran.

4. Presentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti

Penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK akan selalu dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah, untuk itu bagi OPD/unit kerja yang masih memiliki tunggakan penyelesaian tindaklanjut LHP BPK agar selalu berkomunikasi dengan Inspektorat.

Target kinerja berkenaan dengan indikator ini adalah seluruh temuan BPK/Inspektorat ditindaklanjuti. Untuk BKPP hal ini sudah dilaksanakan seluruhnya atau 100%

Tabel TC. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	Tahun 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks profesionalitas ASN			65	65	63	65	62.9	62.9	63	65	
2	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian IT			90	90	80	85	91.31	91.31	80	85	
3	Nilai Evaluasi LKIP			80	80	78,25	78,1	85.20	85.20	78,25	78,1	
4	Presentase temuan Inspektorat yang ditindak lanjuti			80	80	80	80	100	100	80	80	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Tuntutan visi keempat Walikota Gorontalo yakni Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumber daya aparatur dituangkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo dalam sasaran startegisnya yakni meningkatnya pengembangan sumber daya aparatur dan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dengan mengedepankan penanganan isu-isu yang berkembang serta permasalahan permasalahan dibidang kepegawaian dan Diklat. Capaian kinerja pelayanan BKPP sampai dengan tahun 2023 antara lain :

1. Indeks Profesional ASN capaian kinerja 96.7 %
2. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian IT Capaian Kinerja 107.42%

Dari 2 indikator kinerja diatas dua indikator masih masih perlu mendapat perhatian yaitu indikator 1 “Indeks Profesionalitas ASN” karena realisasinya masih belum mencapai target yang ditentukan. Pemerintah Kota Gorontalo yang tinggi terhadap peningkatan kompetensi aparatur akan menjadi salah satu pendorong dalam meningkatkan capaian kinerja tersebut. Adapun beberapa isu penting dalam peningkatan kinerja BKPP antara lain :

- Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen talenta dalam mutasi dan promosi jabatan

Manajemen Talenta bagi Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN menjadi pedoman bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam upaya akselerasi reformasi manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Manajemen Talenta selain menjadi pilar penting dari sistem merit, Manajemen Talenta bertujuan untuk mempersiapkan pegawai yang memiliki kompetensi terbaik untuk mengisi posisi maupun jabatan yang selaras dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai, sehingga akan tercipta pelayanan publik yang optimal dan mendorong pencapaian strategis dari pembangunan daerah yang berpengaruh pada tren positif dalam proses pembangunan nasional.

Namun dalam pelaksanaannya, Manajemen Talenta belum terlaksana dengan baik dalam proses kegiatan mutasi dan promosi jabatan di lingkup Pemerintahan Kota Gorontalo, hal ini dapat ditinjau dari posisi jabatan tertentu yang diisi oleh pegawai

yang memiliki kompetensi kurang sesuai dengan jabatannya. Patut disadari bahwa pelaksanaan Manajemen Talenta merupakan tahapan penting demi mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang optimal melalui pegawai yang memiliki kompetensi terbaik yang akan dilaksanakan di lingkup Pemerintah Kota Gorontalo, maka dari itu penerapan masih akan dipelajari dari BKD Provinsi Gorontalo yang sudah terlebih dahulu menerapkan Manajemen Talenta kepada pegawai yang ada di lingkup Pemerintahan Provinsi Gorontalo

➤ **Belum optimalnya Disiplin aparatur**

Belum optimalnya disiplin aparatur dapat dilihat pada kedisiplinan waktu dan kedisiplinan kerja, tingkat kehadiran pegawai, kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing individu pegawai, kemampuan berinovasi masih rendah, dan penempatan aparatur yang belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, hal-hal tersebut berpengaruh pada tingkat kedisiplinan aparatur, yang dapat mempengaruhi produktivitas pegawai itu sendiri dan pegawai lain yang menggantikan pekerjaan pegawai yang kurang disiplin, serta berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan.

➤ **Belum Optimalnya Pemetaan Kompetensi Pegawai.**

Dengan adanya undang-undang Aparatur Sipil Negara maka kompetensi aparatur menjadi faktor penting dalam tingkat kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang dimiliki oleh masing-masing pegawai agar senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara. Kompetensi bagi setiap individu harus terus ditingkatkan pencapaiannya baik melalui pendidikan formal, kursus maupun pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan pola pikir menuju kearah yang lebih baik. Untuk mempersiapkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara sempurna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, perlu adanya pemetaan kompetensi terhadap seluruh aparatur pemerintah Kota Gorontalo agar pengelolaan pemerintah terhadap pengembangan kompetensi pegawai dapat dilakukan dengan lebih mudah dan tepat sasaran

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja. Bagian ini berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai

dengan rancangan awal SKPD, termasuk dalam hal penganggaran. Tahapan rancangan awal SKPD disajikan dalam tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Gorontalo Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.860.899.295	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.860.899.295		
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	8 Dokumen	29.069.900	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	8 Dokumen	29.069.900		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	12.069.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dokumen	12.069.900		
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	2.750.000	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	2.750.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	10.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	10.500.000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	3 Laporan	3.750.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	3 Laporan	3.750.000		
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.648.023.753	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.648.023.753		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	5.601.109.753	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	5.601.109.753		
	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 dokumen	43.229.000	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 dokumen	43.229.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3.685.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3.685.000,00		
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	7.970.000	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	7.970.000		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	12 laporan	7.970.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	12 laporan	7.970.000		

	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah'	100%	3.070.000	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah'	100%	3.070.000		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	3.070.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	3.070.000		
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Layanan Administrasi Umum	100%	330.157.268	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Layanan Administrasi Umum	100%	330.157.268		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 paket	1.999.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 paket	1.999.200		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	19.919.540	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	19.919.540		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	12 paket	41.313.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	12 paket	41.313.900		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 paket	9.875.778	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 paket	9.875.778		
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	41.079.900	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	41.079.900		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	215.968.950	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	215.968.950		
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	157.434.418	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	157.434.418		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	12.428.962	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	12.428.962		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya Yang Disediakan	7 Unit	145.005.456	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya Yang Disediakan	7 Unit	145.005.456		
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	615.887.956	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	615.887.956		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.000.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	360.455.456	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	360.455.456		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	253.432.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	253.432.500		

	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	100%	69.286.000	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	100%	69.286.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	45.420.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	45.420.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	1 Unit	9.936.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	1 Unit	9.936.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	12 unit	13.930.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	12 unit	13.930.000		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	90%	996.365.400	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	90%	996.365.400		
	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Jumlah Pengadaan ASN	90%	196.427.100	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Jumlah Pengadaan ASN	90%	196.427.100		
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 dokumen	86.929.700	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 dokumen	86.929.700		
	Koordinasi Pelaksanan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	100 dokumen	14.110.300,00	Koordinasi Pelaksanan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	100 dokumen	14.110.300,00		
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	20.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	20.000.000		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawwaan	12 dokumen	52.650.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawwaan	12 dokumen	52.650.000		
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	12 dokumen	22.737.100	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	12 dokumen	22.737.100		
	MUTASI DAN PROMOSI ASN	Jumlah Kegiatan Mutasi dan Promosi	100%	560.160.400	MUTASI DAN PROMOSI ASN	Jumlah Kegiatan Mutasi dan Promosi	100%	560.160.400		
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	2 dokumen	489.539.400	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	2 dokumen	489.539.400		
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	1750 dokumen	19.297.800	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	1750 dokumen	19.297.800		

	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	12 dokumen	51.323.200	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	12 dokumen	51.323.200		
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi	100%	49.066.600	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi	100%	49.066.600		
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	300 ASN	49.066.600	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang memperoleh Peningkatan Kapasitas	300 ASN	49.066.600		
	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	Persentase Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatus	100%	190.711.300	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	Persentase Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatus	100%	190.711.300		
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 dokumen	168.500.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 dokumen	168.500.000		
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan pengelolaan Penyelesaian Disiplin ASN	1 laporan	22.211.300	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan pengelolaan Penyelesaian Disiplin ASN	1 laporan	22.211.300		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	80%	349.051.025	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	80%	349.051.025		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural	100%	349.051.025	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural	100%	349.051.025		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	0 laporan	349.051.025	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	0 laporan	349.051.025		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo

Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan manajemen kepegawaian selama kurun waktu lima tahun adalah untuk Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan Organisasi Pemerintah Daerah.
2. Percepatan Reformasi Birokrasi.

b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi (PAN-RB) memiliki visi ***“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”*** dan Misi yaitu;

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, dan Terintegrasi dan Berbasis Elektronik - *digital bureaucracy*
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif, dan Berwawasan Global
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen, dan Berintegritas
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang bersih, Akuntabel, dan Melayani
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Visi dan Misi diatas dicapai dengan tujuan strategis yaitu; **“Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel, dan berdaya saing”** dan **“Terwujudnya Kementerian PAN-RB yang berkualitas dan kapabel”**

c. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Visi yang diusung oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia adalah **“Mewujudkan Pengelolaan ASN yang professional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia maju”**

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Badan Kepegawaian negara dan penjabaran dari misi Memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan telah menyusun Renstra Tahun 2025 – 2026 berdasarkan RPD Tahun 2025 – 2026 dengan merumuskan tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

➤ **Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN dengan sasaran :**

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur
2. Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan yang berkualitas Prima
3. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD

Sasaran tersebut diatas diukur dengan indikator kinerja yang untuk tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut :

a. *Indeks Profesionalitas ASN*

Pada renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo ditetapkan target capaian sampai dengan tahun 2026 skor/Indeks 65

b. *Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Berbasis IT*

Pada renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo ditetapkan target capaian sampai dengan tahun 2026 skor/Indeks 85

c. Nilai AKIP

Pada renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo ditetapkan target capaian sampai dengan tahun 2026 Nilai 78,1

d. Persentase Hasil Temuan yang ditindaklanjuti

Pada renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo ditetapkan target capaian sampai dengan tahun 2026 adalah 80 %

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2025 didasarkan pada faktor pertimbangan logis dan strategis dalam rangka mendukung Pemerintah Kota Gorontalo, implementasi reformasi birokrasi, perbaikan sistem manajemen kepegawaian, perbaikan pelayanan kepegawaian, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/418/Keuda Tahun 2020 tentang Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, antara program dan kegiatan tahun 2025 tidak jauh berbeda dengan program dan kegiatan tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo tahun 2025 memiliki 3 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 2 bidang dan 1 sekretariat.. Program dan kegiatan tahun 2025 sebagaimana tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
T-C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SATUAN	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	Persen		90%	996.365.400			97%	1.027.951.794
5.03.02.2.01	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase rata-rata capaian kinerja pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian	Persen		90%	196.427.100			95%	210.341.275
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen		3	86.929.700	Pendapatan Bagi Hasil		2	89.118.215
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen		100	14.110.300	Pendapatan Bagi Hasil		100	15.934.240
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN Yang Difasilitasi	Lembaga		1	20.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		1	20.500.000
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		1	52.650.000	Pendapatan Bagi Hasil		1	56.334.000
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen		12	22.737.100	Pendapatan Bagi Hasil		12	28.454.820

5.03.02.2.02	Mutasi Dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi Yang Diproses Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Persen		100%	560.160.400			100%	565.176.082
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaann Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen		2	489.539.400	Pendapatan Bagi Hasil		2	461.250.000
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen		1750	19.297.800	Pendapatan Bagi Hasil		1750	44.105.545
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen		12	51.323.200	Pendapatan Bagi Hasil		3	59.820.537
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya	Persen		100%	49.066.600			95%	56.995.355
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN Yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang		300	49.066.600	Pendapatan Bagi Hasil		300	56.995.355
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Persen		100%	190.711.300			100%	195.479.082
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen		12	168.500.000	Pendapatan Bagi Hasil		12	172.712.500
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan		1	22.211.300	Pendapatan Bagi Hasil		5	22.766.582
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi	Persen		80	349.051.025			80	357.777.685
5.04.02.2.02	Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Yang Memiliki Sertifikat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persen		100	349.051.025			100	357.777.685

5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan		0	349.051.025	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil		600	357.777.685
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100%	7.857.264.695			100%	7.208.314.881
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja	Persen		100%	29.069.900			100%	34.409.148
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2	12.069.900	PAD		3	12.371.648
5.03.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		4	2.750.000	Pendapatan Bagi Hasil		2	2.818.750
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		12	10.500.000	PAD		1	12.812.500
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		3	3.750.000	PAD		3	6.406.250
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Daerah	Persen		100%	5.648.023.753			100%	6.080.214.560
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		41	5.601.109.753	PAD, DTU, DAU, DAU Tambahan		41	6.028.227.060
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12	43.229.000	PAD		12	44.300.000
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	3.685.000	PAD		1	7.687.500

5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Barang Milik Daerah	Persen		100%	7.970.000	PAD		100%	8.169.250
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan		12	7.970.000	PAD		12	8.169.250
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		100%	3.070.000			100%	3.146.750
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		12	3.070.000	PAD		12	3.146.750
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum	Persen		100%	330.157.268			100%	309.318.759
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		12	1.999.200	PAD		12	2.050.000
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket		12	19.919.540	PAD		12	20.079.442
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket		12	41.313.900	PAD		12	24.886.795
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Baran Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket		12	9.875.778	PAD		12	11.059.750
5.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan		12	41.079.900	PAD		12	29.842.772
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12	215.968.950	PAD		20	221.400.000
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Dan Prasarana dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		100%	157.434.418	PAD		100%	115.670.956
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Paket		2	12.428.962	Pendapatan Bagi Hasil		7	12.739.686
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	unit		7	145.005.456	Pendapatan Bagi Hasil		7	102.931.270
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100%	615.887.956	PAD		100%	591.730.877
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12	2.000.000	PAD		12	2.050.000

5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan		12	360.455.456	DAU		12	369.466.842
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantir Yang Disediakan	Laporan		12	253.432.500	DAU		12	220.214.035
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Dipelihara	Persen		100%	69.286.000	PAD		100%	65.654.581
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		7	45.420.000	PAD		7	46.138.581
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung		1	9.936.000	Pendapatan Bagi Hasil		1	10.250.000
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		12	13.930.000	PAD		12	9.266.000

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah 20.. – 20.. . Rencana Kerja ini memuat arah dan kebijakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selama 1 (satu) tahun dan menjadi dasar perumusan kegiatan, output Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo adalah Program Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Adapun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo dan Pendanaannya sebagai berikut:

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan BKPP Kota Gorontalo Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Komponen Instalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			Pengelolaan Data Kepegawaian	
		MUTASI DAN PROMOSI ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			Pengelolaan Promosi ASN	
		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2025 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Esensi dari semua program dan kegiatan ini adalah bahwa semua pihak atau para stakeholder yang memiliki peran dalam program dan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo diharapkan dapat mengamankan semua kebijakan yang ada dan dengan sungguh-sungguh dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja.

Selain itu, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo merupakan dasar evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahunan BKPP Kota Gorontalo yang berarti bahwa setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo dapat terlaksana apabila mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak dan tersedianya anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo dibuat untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan pelayanan Kepegawaian dan Diklat di Kota Gorontalo.

Gorontalo, Juli 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO**



Drs. H. BEN IDRUS, M.Pd
NIP. 19641215 199003 1 009